



## PENTINGNYA OTONOMI PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Riesca Wachyuppy

Pengawas Sekolah Muda Tingkat RA, Jakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### *Riwayat Artikel:*

Diterima 20 Oktober 2022  
Direvisi 27 Oktober 2022  
Revisi diterima 03 November 2022

#### *Kata Kunci:*

Manajemen, Mutu Pendidikan,  
Otonomi Pendidikan.

*Educational Autonomy,  
Management, Quality of  
Education.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam mengenai konsep, tujuan dan manfaat otonomi pendidikan, serta implementasinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka, artinya penelitian ini diambil dari beberapa sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi pendidikan merupakan suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting dilakukan melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas kelembagaan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan dan juga prinsip pemerintahan yang baik.

### ABSTRACT

This study aims to examine more deeply the concepts, objectives and benefits of educational autonomy, as well as their implementation in an effort to improve the quality of education in Indonesia. This research is a literature review research, meaning that this research is taken from several sources of information. The results of the study show that educational autonomy is a granting of authority, mandate, trust in being responsible for the management of education from the Central Government to the Regional Governments; and/or from the Regional Government to the Education Unit, both in terms of funds, personnel, facilities and infrastructure as well as education management and curriculum. Indonesia is an archipelagic country with a variety of cultures, languages, traditions, ethnicities and religions that have a significant influence on its education system. Through education

---

autonomy can increase management efficiency and satisfaction of educational staff and create an education system with concrete policies; educational resources can be utilized optimally; can explore local potential more effectively, can manage an education system that is in line with local culture, and community participation in education increases; accountability also increases; and in turn the quality of education can be guaranteed. Improving the quality of education is very important through community participation, empowerment and also increasing institutional capacity which is guided by national education standards and also the principles of good governance.

---

***Penulis Koresponden:***

Riesca Wachyuppy  
Pengawas Sekolah Muda Tingkat RA  
Jl. Hj.Tuty Alawiyah No.2 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia  
[Riescha\\_w@gmail.com](mailto:Riescha_w@gmail.com)

---

How to Cite: Wachyuppy, R. (2022). Pentingnya Otonomi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1). 151-161. <https://doi.org/10.56855/intel.v1i1.246>

## **PENDAHULUAN**

Otonomi pendidikan diartikan sebagai suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Otonomi pendidikan diyakini sebagai modal dasar pendidikan yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Otonomi pendidikan merupakan hasil dari adanya otonomi daerah yang terjadi pada saat reformasi di Indonesia. Indonesia merealisasikan kebijakan otonomi daerah melalui pembagian kekuasaan dari yang sebelumnya terpusat pada Pemerintah Pusat menjadi didelegasikan sebagian dari tugas dan kewenangan tersebut pada Pemerintah Daerah. Salah satu tugas dan wewenang yang didelegasikan dalam kebijakan otonomi daerah tersebut adalah bidang penyelenggaraan pendidikan. Daerah diberikan wewenang dalam melaksanakan dan mengambil keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan Standarisasi Nasional.

Otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-keijakan yang konkret; sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas pendidikan juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan juga dapat terjamin.

Otonomi pendidikan memang diyakini sebagai modal dasar untuk terselenggaranya pendidikan berkualitas. Otonomi pendidikan juga diyakini dapat

menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Melalui otonomi pendidikan akan terbangun sistem pendidikan yang kokoh di daerah; demokratisasi pendidikan berjalan dengan partisipasi nyata dan luas dari masyarakat, memupuk kemandirian, mempercepat pelayanan, dan potensi sumberdaya lokal di daerah dapat didayagunakan secara optimal untuk suatu kemajuan pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan, otonomi pendidikan menjadi jawaban atas tantangan tersebut dan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adanya semangat otonomisasi, baik otonomi Pemerintah Daerah maupun otonomi pendidikan memberikan keleluasaan bagi masing-masing untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta memenuhi harapan masyarakat. Untuk memahami hal tersebut maka perlu diuraikan lebih lanjut mengenai konsep, tujuan dan manfaat otonomi pendidikan, serta urgensinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data-data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode penelitian ini berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (*review of research*) (Karuru, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Otonomi Pendidikan**

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Maka otonomi dapat berarti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, arti tersebut dikembangkan menjadi “pemerintah sendiri”. Sedangkan pendidikan menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Otonomi (desentralisasi) pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan di bawahannya. Penyelenggaraan otonomi pendidikan dipertegas dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menegaskan pergeseran paradigma pendidikan nasional dari education for all (pendidikan untuk semua) menjadi education from all, by all, and for all (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua). Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan dan pengawasan.

Otonomi pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terungkap dalam Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orangtua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada Bagian Ketiga ‘Hak dan Kewajiban Masyarakat’ Pasal 8 mengatakan bahwa

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Pada Bagian Keempat ‘Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah’ Pasal 11 menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Peraturan Pemerintah Pusat No. 25 tahun 2000 menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
6. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajara efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
9. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
10. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan yaitu :

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
5. Penyelenggaraan sekolah luarbiasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.

6. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Sedangkan tanggungjawab dan wewenang sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu :

1. Memperoleh perijinan pendirian satuan pendidikan
2. Penyelenggara pendidikan dasar dan menengah
3. Penerimaan peserta didik
4. Melakukan pengelolaan pendidikan
5. Mengembangkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah
6. Memberikan ijazah kepada peserta didik.

Melalui otonomi daerah Pemerintah Pusat berperan sebagai penjamin (penanggungjawab) pengelolaan dan penentu kebijakan serta standar pendidikan secara nasional. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah untuk tingkat dasar dan menengah, serta mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Sekolah/madrasah berperan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

Ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005) faktor tersebut antara lain :

1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan buruh, untuk turut serta, berpartisipasi aktif, mengontrol dan melakukan penilaian kualitas proses dan output pendidikan.
2. Struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan dan tuntutan pendidikan bermutu sesuai karakteristik dan harapan masyarakat yang beraneka ragam.
3. Terjadinya tuntutan reformasi dalam bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antardaerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan; yang menjadikan kurangnya kreativitas dari daerah, sekolah, dan personalia penyelenggara pendidikan serta akibatnya kemandirian dalam pengelolaan pendidikan sulit diwujudkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren perkembangan penduduk dan

masyarakat untuk memperoleh konstruk msayarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika.

### **Pengertian Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa arab “حَسَن” artinya baik”, dalam bahasa Inggris “quality artinya mutu, kualitas”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”. Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Mutu pendidikan berasal dari dua kata yaitu mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Inggris yaitu ‘quality’ berarti mutu, kualitas. Dalam KBBI mutu berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Sedangkan pendidikan sebagaimana sebutkan di awal menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki kurikulum, menambah buku pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. Mutu pendidikan itu meru-pakan persoalan mikro pendi-dikan yang terkait dengan persoalan ke-mampuan guru, kesiapan seko-lah dalam mendukung proses belajar dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan partisipasi masyarakat pendukung pendi-dikan yang ada di wilayahnya disertai penataan manajemen.

Menurut Indra Djati Sidi, mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembinaan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (minimum basic skill ), menerapkan konsep belajar tuntas dan membangkitkan sikap kreatif, demokratis dan mandiri serta menerapkan secara berkesinambungan kurikulum berbasis kompetensi.
2. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan, melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan lembaga diklat profesional.

3. Penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendidikan yang menjadi persyaratan bagi setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah, lembaga pendidikan tinggi, sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4. Pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah sebagai upaya pemberian otonomi pedagogis kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik, meningkatkan prestasi siswa, dan kinerja sekolah serta dapat bertanggung jawab pada orang tua dan masyarakat tentang kualitas pembelajaran dan hasil yang dicapai.
5. Penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan koperatif antarsekolah dalam memajukan dan meningkatkan kualitas siswa dan sekolah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Melalui ikhtiar ini, setiap sekolah akan terpacu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran.
6. Penerapan telematika dalam pendidikan, pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten/kota; pengembangan sekolah berkeunggulan lokal di setiap kabupaten/kota; perluasan pendidikan berkecakapan hidup; akselerasi jumlah prodi kejuruan, vokasi dan profesi; serta peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah.
7. Perumusan dan peningkatan standardisasi pendidikan. Dalam pendidikan terdapat dua jenis standar, yaitu standar akademis (*academic content standards*) dan standar kompetensi (*performance standards*). Standar akademis merefleksikan penge-tahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik. Sedangkan standar kom-petensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.

Penyelenggaraan otonomi sekolah sebagai langkah esensial dari otonomi daerah; dan telah diterapkan suatu terobosan kebijaksanaan untuk otonomi pendidikan yang disebut manajemen berbasis sekolah (*school based management*). Dengan otonomi sekolah, dapat lebih dioptimalkan peran sekolah dan menghargai kebutuhan nyata di setiap sekolah. Pemerintah sekarang telah berkomitmen, bahwa pendidikan berkualitas hanya akan nyata terwujud, bila otonomi daerah berujung pada otonomi sekolah yang berbasiskan manajemen (*School based management*) ( Depdikbud, 2002).

### **Urgensi Otonomi Pendidikan di Indonesia**

Beberapa faktor yang mendasari penyelenggaraan otonomi di Indonesia adalah :

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut.
3. Desa dan persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.

4. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang deomkratis.
5. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut.
6. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi.Republik Indonesia yang luas dan penduduknya yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi) efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Terdapat beberapa faktor pendorong, terhadap implmentasi otonomi pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Adanya tuntutan dari orangtua, partisipasi masyarakat, bisnis, perhimpunan buruh untuk turut berpartisipasi dalam mengontrol setiap kegiatan dan menilai kualitas dalam proses pengeluaran pendidikan.
2. Struktur pendidikan juga turut mempengaruhi dalam proses pendidikan jika struktur pendidikannya terpusat akan berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dan juga ketidak mampuan dalam birokrasi yang ada untuk merespon segala kebutuhan dan dan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi pendidikan.
3. Adanya tuntutan reformasi di bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, SDM dalam penyelenggaraan pendidikan; yang menyebabkan kurangnya kreativitas dari pemerintah daerah karena terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Otonomi (desentralisasi) pendidikan memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi sebagai berikut :

1. Pola dan pelaksanaan manajemen yang diterapkan dalam otonomi pendidikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan monitoring serta evaluasinya harus demokratis.
2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; peran serta masyarakat harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan pendidikan; sehingga masyarakat diberi keleluasaan berpartisipasi, terlibat dan melibatkan diri secara aktif, difasilitasi, diberi ruang aktualisasi dan akhirnya diberi kepercayaan dan pengharhgaaan atas partisipasinya.

3. Pelayanan harus lebih cepat, efisien dan efektif demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; serta keanekaragaman aspirasi serta nilai dan norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan untuk penguatan sistem pendidikan nasional..

### **Tujuan dan Manfaat Otonomi Pendidikan**

Otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas pendidikan juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.

Di era pasca reformasi hingga saat ini, pendidikan nasional setidaknya menghadapi lima tantangan besar yang sangat kompleks. Tantangan-tantangan itu saling berkaitan satu sama lain dan memberi dampak langsung terhadap dunia pendidikan, serta dunia pendidikan harus dapat menyikapi tantangan itu secara efektif. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tersebut, menurut Sidi yaitu:

1. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (added value). Meningkatkan nilai tambah dalam rangka membangun produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan di tengah tuntutan kebutuhan yang tak terbatas.
2. Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat modern menuju masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, dengan jalan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (iptek).
4. Tantangan terhadap munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet, sehingga bangsa kita menjadi sangat tergantung kepada bangsa Barat dalam hal teknologi dan informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam virtual enemy yang telah masuk ke seluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan itu menuntut SDM Indonesia, khususnya generasi muda terpelajar agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan, wawasan keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif), keahlian yang profesional, serta keterampilan kualitasnya.
5. Tantangan berkaitan dengan bertambah rusaknya jaman, dekadensi moral yang terus meningkat; dan terpaan secara dahsyad budaya global serta dunia pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki ahlakul karimah, melainkan pula mampu dan tanggap membentengi diri dan mengarahkan

pihak lain terhadap berbagai perilaku yang merusak tatanan agama, budaya dan etika bangsa

Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan di tingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan terwujudnya pelayanan pendidikan sebagai modal dasar terselenggaranya pendidikan berkualitas serta sebagai instrumen vital dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Otonomi pendidikan diartikan sebagai suatu pemberian wewenang, mandat, kepercayaan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ragam budaya, bahasa, tradisi, suku, dan agama yang memberikan pengaruh signifikan bagi sistem pendidikannya. Melalui otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; sumberdaya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal; dapat menggali potensi lokal lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat; akuntabilitas juga meningkat; dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin.

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting dilakukan melalui partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas kelembagaan yang berpedoman pada standar nasional pendidikan dan juga prinsip pemerintahan yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dede Rosyada, et all. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE. Syarif Hidayatullah, 2003
- Deden Saeful Ridhwan dan Leni Nurmiyanti, *Pengaruh Otonomi Daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Edukasi Kemenag. STIT Islamic Village Tangerang, 2016
- Hartono, *Otonomi Pendidikan*. Jurnal Potensia Vol. 14 Edisi 1. Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau, 2015
- John M. Echolis, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1988), Cet. Ke XVI
- Karuru, P. (2013). *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2(1), 1-9.
- Lazuardi, *Desentralisasi Pendidikan; Peluang dan Tantangan*. Jurnal Forum Pedagogik. IAIN Padang Sidempuan, 2013
- Made Saihu, *Manajemen Berbasis Madrasah, Sekolah, dan Pesantren*. Yapin An-Namiyah. Tangerang Selatan, 2020
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Bandung : Al-Ma'arif, 1984

Novendra Hidayat, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. Jurnal Society. FISIP UBB, 2016

Otonomi Pendidikan: Sebagai Jawaban dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53203/pp-no-25-tahun-2000>

Sadriana Ayu, Pengaruh Otonomi Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu SMA Unismuh Makassar. Jurnal Penelitian dan Penalaran. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar, 2017

Suharizal, Muslim Caniago. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Thafa Media. Yogyakarta, 2014